

Implementasi kebijakan penyelenggaraan perkeretaapian : studi sarana dan prasarana commuterline Duri-Tangerang

Baiatul Masitoh Kusumaningtyas, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20385848&lokasi=lokal>

Abstrak

UU Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian merupakan dasar aturan penyelenggaraan perkeretaapian nasional. Kereta api merupakan salah satu layanan publik yang masih memiliki berbagai masalah. Dalam sistem pengoperasian Commuterline terpadu di wilayah Jabodetabek, penyediaan layanan khususnya sarana dan prasarana masih banyak dikeluhkan penumpang. Penelitian ini akan membahas bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan sarana dan prasarana Commuterline di salah satu jalur, yaitu Duri-Tangerang. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan pospositivis secara deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang terjadi dalam proses implementasi masih terkendala komunikasi antar aktor yang terlibat, yaitu Dirjen Perkeretaapian dan PT KAI. Selain itu, kekurangan anggaran mempengaruhi pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan rencana kerja yang pada akhirnya memperlambat perbaikan layanan perkeretaapian. Penyelenggaraan sarana dan prasarana Commuterline Duri-Tangerang belum maksimal dan masih terdapat ketidaksesuaian antara aturan yang telah dibuat dengan pelaksanaan.

.....

Act Number 23 of 2007 about Railways is the national railway operation rules. The train is one of the public service that still has many problems. Commuterline that integrated in the operating system in Jabodetabek, in particular service delivery facilities and infrastructure are still many passengers complained. This study will further discuss how the implementation of policy management facilities and infrastructure in one pathway Commuterline, Duri-Tangerang. Research conducted with post-positivist approach by descriptive purpose, data collecting by observation, indepth interview and literature analysis. The results showed that the activity that occurs in the process of implementation is still hampered communication between the actors involved, the Director General of Railways and PT KAI. In addition, the budget shortfall affecting human resource fulfillment and work plan ahead, which in can slows the improvement of railway services. There is still a mismacth between the rules that have been made with the implementation in Commuterline Duri-Tangerang.